

**PENGARUH STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA MELALUI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA
SEI MERAH KECAMATAN TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG**

RINY VIRI INSY SINAGA

*Dosen Fakultas Ekonomi UNIVA Medan

NIDN : 0106128601

Email : riny30vinsi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi pembangunan desa berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan desa di Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan beberapa uji yakni reliabilitas dan *regression linier* sederhana. Berdasarkan hasil regresi data primer yang diolah dengan menggunakan SPSS 18, diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: $Y : 21,622 + 0,704X$. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan besarnya t tabel adalah 2,003 dan diketahui bahwa variabel strategi pembangunan desa memiliki t hitung sebesar 5,608, jika dibandingkan dengan t tabel maka hasilnya $5,608 > 2,003$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel strategi pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap variabel peningkatan pendapatan desa. Berdasarkan hasil perhitungan regresi koefisien determinasi model summary pada tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,360. Hal ini memiliki arti bahwa 36% variabel peningkatan pendapatan desa dapat dipengaruhi oleh variabel strategi pembangunan desa. Sedangkan sisanya 64 % dapat dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikut sertakan dalam penelitian.

Kata kunci : Pembangunan Desa, Pendapatan Desa

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.

Pembangunan Nasional pada umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi. Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian Negara. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemerdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa Sei Merah yang berada di Kecamatan Tj Morawa Kabupaten Deli serdang. Dalam penelitian ini, pendirian BUMDes Sei Merah Serasi termasuk ke dalam perencanaan pembangunan dari bawah (*Bottom-Up Planning*), hal ini karena BUMDes Sei Merah Serasi tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, melainkan berdasarkan atas inisiatif dari salah satu warga desa yang ingin menggabungkan usaha-usaha desa yang sebelumnya sudah ada agar dijadikan

satu dalam sebuah lembaga desa, serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi warga desanya. Berdasarkan usulan warga tersebut kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian program desa tersebut.

Salah satu program BUMDes Sei Merah Serasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu Koperasi Simpan Pinjam, dimana BUMDes mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kepada masyarakat untuk pengembangan usaha rumahan yang dikelola oleh BUMDes dengan jumlah penyaluran maksimal 4 juta per kepala keluarga, diharapkan dari kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Sei merah Kec. Tj Morawa. BUMDes Sudah berjalan selama lima tahun dan sudah ada banyak masyarakat yang terbantu dari kegiatan BUMDes ini, dan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Proporsi Penyaluran Modal Ke Warga

No	Tahun	Jumlah Yang disalurkan	Penerima
1	2014	Rp. 50.000.000	20 Kepala Keluarga
2	2015	Rp. 85.750.000	30 Kepala Keluarga
3	2016	Rp. 157.000.000	40 Kepala Keluarga
4	2017	Rp. 180.000.000	50 kepala Keluarga

Sumber : Data Penyaluran BUMDes Sei Merah Serasi (2018)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pendirian Koperasi Simpan Pinjam Di Desa Sei Merah sangat disambut positif oleh warga Desa Sei Merah. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah dana yang disalurkan ke warga dalam rangka pengembangan usaha meningkat setiap tahunnya, walaupun masih sedikit dari warga yang menerima bantuan pinjaman tanpa bunga , namun kegiatan ini akan terus dijalankan sehingga semakin banyak warga yang akan di bantu. Maka dari itu agar kegiatan BUMDes ini terus terlaksana dibutuhkan partisipasi warga untuk menyimpan sedikit dana nya ke koperasi sehingga akan semakin banyak yang akan disalurkan ke warga untuk mengembangkan usahanya. Karena semakin banyak warga yang dibantu dalam pengembangan usaha maka kesejahteraan warga akan semakin meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan desa di Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa ?

1.3 Batasan Masalah

Pengaruh Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah strategi pembangunan desa berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan desa di Desa Sei Merah Kec. Tj Morawa.
2. Untuk mengetahui Apakah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan desa di Desa Sei Merah Kec. Tj Morawa.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman serta untuk menerapkan teori-teori yang didapat di bangku kuliah ke dalam praktek manajemen khususnya dibidang kinerja pemerintah desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Indikator Pembangunan Desa

Pembangunan menurut beberapa ahli yaitu: pembangunan menurut Kuncoro (2014:87) berpendapat bahwa “Pembangunan desa adalah suatu proses di mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi”. Menurut Sun’an dan Senuk (2015:1) berpendapat bahwa “pembangunan daerah merupakan sebuah sistem yang terbuka, sesuatu yang tidak terbatas”. Selanjutnya menurut Ali Kabul dan Trigunarjo (2017:29) berpendapat bahwa “pembangunan desa adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (*valid*) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik”.

Menurut Arikunto (2016:137), “indikator adalah hal atau sesuatu yang dapat menunjukkan atau menjadi petunjuk bagi variabel sehingga dapat di observasi atau dapat di ukur”. Indikator pembangunan desa adalah :

1. Membangun Desa Bersama
2. Pengawasan
3. Keanekaragaman warga/masyarakat
4. Koordinasi

5. Komunikasi
6. Implementasi kebijakan
7. Pencapaian Prestasi

2.1.1. Langkah dan Model Pembangunan Desa

Pembangunan daerah menyangkut kegiatan yang mengerahkan seluruh sumber daya (manusia, dana, bahan-bahan, peralatan, dan metode). Keberadaan seluruh sumber daya untuk melakukan kegiatan terbatas secara ruang, waktu dan kelembagaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan kegiatan yang mencakup 4 (empat) langkah besar sebagai berikut (Sunan dan Senuk, 2015:6):

1. Perencanaan (*Planning*) merencanakan dan menetapkan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan sasaran-sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang melalui pertimbangan prioritas dan ketersediaan sumber daya.
2. Pengorganisasian (*organizing*) mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber daya dan waktu berdasarkan kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk sistem dan prosedur kerjanya.
3. Pelaksanaan (*Actualiting*) melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, berdasarkan rencana tindak yang disusun didalam kerangka organisasi dan alokasi sumber daya.
4. Pengendalian (*Controlling*) mengendalikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan agar mencapai sasaran-sasaran rencananya, di dalam batas-batas organisasi dan alokasi sumber daya, sesuai dengan jadwal rencana tindak.

Menurut Adisasmita (dalam, Sun'an dan Senuk (2015:5) Model pembangunan dapat dilihat dari berbagai dimensi, dilihat dari dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, administrasi dan lainnya. Berdasarkan perkembangannya, model pembangunan ekonomi banyak yang digunakan oleh negara-negara berkembang adalah sebagai berikut:

1. Model I, menitik beratkan pada Pertumbuhan Produk Domestik (PPB) yang berkembang pada dekade 1950-an dan 1960-an. Berdasar anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan pelaksanaan penanaman modal atau investasi dalam jumlah besar di sektor industri dengan cara menempatkan proyek yang satu sama lain saling menunjang dipusatkan pada suatu wilayah atau bagian wilayah.

2. Model II, menitikberatkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok yang berkembang pada dekade 1970-an. Pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok meliputi pula perkembangan kesempatan kerja dan berusaha, pemberantasan kemiskinan, kesehatan dan perbaikan gizi, air bersih dan perumahan, merupakan strategi pembangunan yang lebih sesuai dengan negara-negara berkembang.
3. Model III, menitikberatkan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang berkembang pada dekade 1980-an. Model ini mengupayakan pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemerdayaan masyarakat, pembelajaran masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya lokal, dalam rangka pembangunan masyarakat lokal.

2.1.2. Tujuan dan Strategi Pembangunan Desa

Menurut Ali Kabul dan Trigunarso (2017:48) tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam, dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat.

Manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/tarif hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, fisik (infrastruktur), yang dilaksanakan secara terpadu oleh sektoral, publik dan, swasta.

Menurut Adisasmita (dalam, Helmei (2008:8) Pembangunan perdesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan perdesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta upaya mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh". Tujuan pembangunan menurut Siagian (dalam Yuni Syahara, 2013:5) yaitu untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang menjadi alasan utama diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sasaran (target) merupakan hasil yang diharapkan atas

adanya suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan Sumpeno (dalam Yuni Syahara, 2013:6).

Menurut Adisasmita (dalam Yuni Syahara, 2013:6) mengungkapkan bahwa dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu dan menyeluruh yang terdiri 7 pendekatan dalam menggambarkan pembangunan desa yaitu:

1. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa.
2. Sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah.
3. Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks.
4. Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun sementara di semua tingkatan, fungsi, kebutuhan dan mekanismenya.
5. Arus komunikasi dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesinambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasif dan edukatif.
6. Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus menerus.
7. Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah perdesaan yang strategis yaitu aspek kependudukan dan berbagai kegiatan yang dilakukan yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2. Pengertian dan Tujuan BUMDes

Definisi BUMDes menurut UU No 6 Tahun 2014 (dalam Amelia, 2004:1) suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Menurut Alkahdafi (dalam Edy Yusuf, 2016:69) BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan

antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi Asean Economic Community 2015.

Ciri yang membedakan BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil. Menurut Maryunani (dalam Edy Yusuf, 2016:69) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut:

1. Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama.
2. Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat.
3. Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal.
4. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha.
5. Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun.
6. Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara berasma oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

2.2.1. Landasan Dasar Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa : Pasal 78

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat.
- 4) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat. Pasal 80.

1.3. Pengertian Pendapatan Asli Desa

Menurut Aryad (dalam Joni Arman, 2014:217) berpendapat bahwa “Pendapatan adalah indikator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara sedang berkembang”. Menurut ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) (dalam, Sri Maulidiah, 2016:147) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 Ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUMDes.

1.3.1. Konsep Pendapatan Asli Desa

Sumber pendapatan Desa menurut Widjaja (dalam Evelin, 2013:4) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”, sumber pendapatan Desa terdiri atas:

1. Sumber Pendapatan Desa
 - a. Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa yang meliputi:
 - a) Hasil usaha desa.
 - b) Hasil kekayaan desa.
 - c) Hasil swadaya dan partisipasi.
 - d) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah.
 - b) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - c) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
 - c. Sumbangan dari pihak ketiga.
 - d. Pinjaman desa.
2. Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi:
 - a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.
 - b. Kegiatan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

1. PAD :
 - a. Hasil Usaha Desa.
 - b. Hasil Kekayaan Desa.

- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi.
- d. Hasil Gotong Royong.
- e. Lain-lain PAD yang sah
2. Bagi hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Daerah, paling sedikit 10%.
 - b. Retribusi Daerah, sebagian.
2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Urusan. Pemerintahan.
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Maka sumber pendapatan desa tersebut harus mendapatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, sehingga dalam penggunaan atau belanja desa dapat teratur sesuai dengan keperluan atau kebutuhan pemerintahan desa.

2.3.2. Indikator Pendapatan Desa

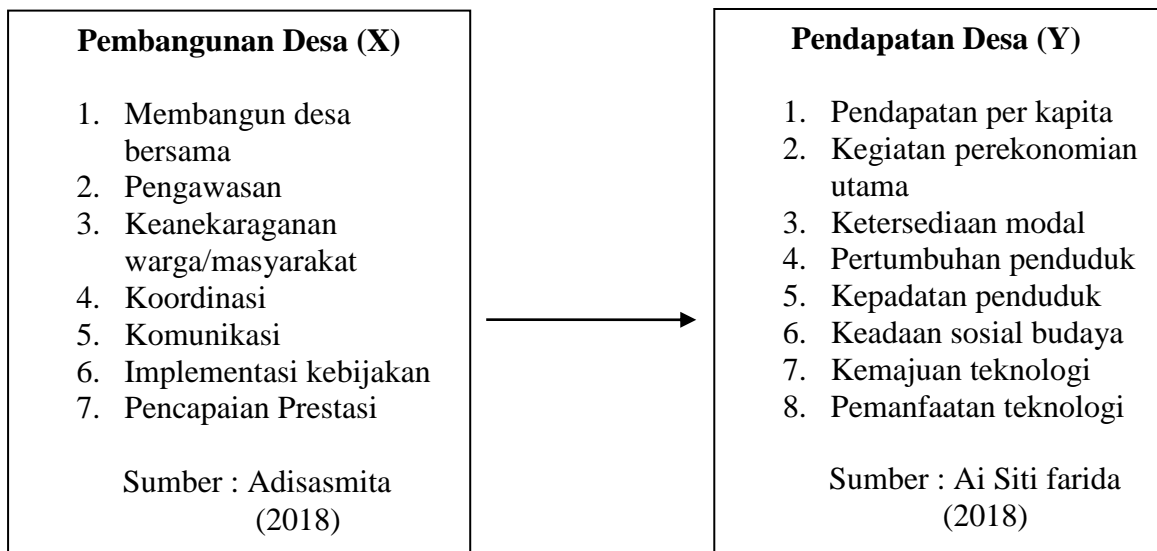
Menurut Arikunto (2016:137), “indikator adalah hal atau sesuatu yang dapat menunjukkan atau menjadi petunjuk bagi variabel sehingga dapat di observasi atau dapat di ukur”. Indikator pendapatan desa adalah :

1. Pendapatan per kapita
2. Kegiatan perekonomian utama
3. Ketersediaan modal
4. Pertumbuhan penduduk
5. Kepadatan penduduk
6. Keadaan sosial budaya
7. kemajuan teknologi
8. Pemanfaatan teknologi

1.4. Kerangka Konseptual

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), “Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting”. Berdasarkan pada landasan teoritis, maka kerangka konseptual yang disajikan dalam penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Azwar (2013:1) menyatakan bahwa desain penelitian adalah “rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan”. Desain penelitian berfungsi untuk membantu pelaksanaan penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh strategi pembangunan desa dalam meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lokasi penelitian ini Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan populasi dalam penelitian ini berjumlah 140 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah teknik acak sederhana (*simple random sampling*). Teknik acak sederhana adalah teknik yang memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel.

Untuk menganalisa data informasi yang diperoleh, penulis menggunakan metode Analisa Regresi Linear Sederhana, Uji Parsial (Uji t), dan Uji Koefisien Determinasi.

3.2. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel menggunakan skala likert yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespons pertanyaan atau variabel yang sedang di ukur. Skala likert menurut Sugiyono (2017:93) ialah skala yang

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

3.3. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:102) karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomenan ini disebut variabel peneltian. Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi sederhana dapat dilihat dari nilai koefisien b pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.622	6.428		3.364	.001
	SPD	.704	.125	.600	5.608	.000

a. Dependent Variable: TPD

Dari perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Program For Social Schedule*) versi 17.0 di dapat :

Konstanta (a) : 21,622

Strategi Pembangunan Desa (b) : 0,704

Jadi persamaan regresi liner sederhana untuk 1 prediktor (strategi pembangunan desa) adalah :

$$Y : 21,622 + 0,704X$$

Keterangan :

- 1) Nilai Konstanta = 21,622 menunjukkan apabila nilai dimensi strategi pembangunan desa bernilai nol. Maka peningkatan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sei Merah Kec. Tj Morawa nilainya sebesar 21,622.
- 2) Peningkatan pendapatan desa (b) sebesar 0,704 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa jika variabel strategi pembangunan desa (X) mengalami kenaikan 1%, maka variabel peningkatan pendapatan desa (Y)

akan mengalami kenaikan sebesar 0,704. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel strategi pembangunan desa (X) dengan variabel peningkatan pendapatan desa (Y), semakin baik strategi yang diterapkan maka pendapatan desa akan semakin naik.

4.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4.2
Uji t Pengaruh Strategi Pembangunan Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.622	6.428		3.364	.001
SPD	.704	.125	.600	5.608	.000

a. Dependent Variable: PPD

Kriteria dalam penelitian ini:

- Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
- Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap terikat (Y).

Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini:

- Jika nilai t dengan probability korelasi yakni sig-2 tailed $>$ taraf signifikan (α) sebesar 0,05 , maka H_0 diterima, sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y.

Jika nilai t dengan probability korelasi sig-2 tailed $<$ taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka H_0 ditolak, sehingga ada korelasi signifikan antara variabel X dan Y.

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel X yaitu strategi pembangunan desa memiliki signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya strategi pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sei Merah Kec. Tanjung Morawa. Jika dilihat dengan membandingkan nilai t tabel, diketahui bahwa tingkat signifikan penelitian ini sebesar 5% (0,05), dengan jumlah df adalah sebesar 57 ($n - k$ atau $58-1$), berdasarkan data tersebut dapat ditentukan besarnya t

tabel adalah 2,003 dan diketahui bahwa variabel strategi pembangunan desa memiliki t hitung sebesar 5,608, jika dibandingkan dengan t tabel maka hasilnya $5,608 > 2,003$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel strategi pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap variabel peningkatan pendapatan desa.

4.3 Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi merupakan besaran nilai koefisien yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan R square sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.600 ^a	.360	.348	6.54762

a. Predictors: (Constant), SPD

b. Dependent Variable: PPD

Berdasarkan hasil perhitungan regresi koefisien determinasi model summary pada tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,600. Hal ini memiliki arti bahwa 60% variabel peningkatan pendapatan desa dapat dipengaruhi oleh variabel strategi pembangunan desa. Sedangkan sisanya 40% dapat dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh strategi pembangunan desa dalam meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sei Merah Kec. Tj Morawa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel X yaitu strategi pembangunan desa memiliki signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ yang artinya strategi pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sei Merah Kec. Tj Morawa. Jika dilihat dengan membandingkan nilai t tabel, diketahui bahwa tingkat signifikan penelitian ini sebesar 5% (0,05), dengan jumlah df adalah sebesar 57 ($n - k$ atau $58-1$), berdasarkan data tersebut dapat ditentukan besarnya t tabel

adalah 2,003 dan diketahui bahwa variabel strategi pembangunan desa memiliki t hitung sebesar 5,608, jika dibandingkan dengan t tabel maka hasilnya $5,608 > 2,003$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel strategi pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap variabel peningkatan pendapatan desa.

2. Berdasarkan hasil perhitungan regresi koefisien determinasi model summary pada tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R square) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,360. Hal ini memiliki arti bahwa 36% variabel peningkatan pendapatan desa dapat dipengaruhi oleh variabel strategi pembangunan desa. Sedangkan sisanya 64 % dapat dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014. *“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”*. Universitas Baniwajaya. Jawa barat.
- Arikunto S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Ali Kabul Mahi, dkk. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Penerbit Kencana. Jawa Barat.
- Edy Yusuf, dkk. 2016. *“Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”*. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- Ety Rochaety, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*. 2009. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Evelin Balandatu. 2013. *“Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)”*.
- Helmei Willy Amanda, 2012. *“Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”*.
- Irham Machfoedz. 2010. *Metode Penelitian*. Penerbit Fitramaya. Yogyakarta.
- Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.

- Muammil Sun'an, dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2014. *Otonomi Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Saifuddin Azwar. 2013. *Metode Penelitian*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sri Maulidiah. 2016. "*Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa*" UIR FISIP.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- S. Margono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Yuni Syahara Rahma Dewi, 2015. "*Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*".